



Implementasi Penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera dan Respon Masyarakat di Kecamatan Pasak Talawang

Inyi¹, Emi Anggraini², Ade Yuniati³, Verra Rizki Amelia⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Palang Raya^{1,3,4}

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah²

e-mail: inyi1802@gmail.com^{1*}, emy.anggrainie041982@gmail.com²,

adeyuniati@feb.upr.ac.id³, verraamelia@feb.upr.ac.id⁴

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) serta respon masyarakat di Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas. Program KHBS merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan tunai, bantuan pangan, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi penerima manfaat. Kegiatan dilaksanakan melalui pendampingan dan sosialisasi dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan monitoring. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyaluran KHBS berjalan dengan baik melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat penerima manfaat. Masyarakat memberikan respon positif karena program dinilai membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan mendukung kondisi ekonomi keluarga, meskipun masih terdapat kendala terkait akses pencairan bantuan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Kata Kunci: *Bantuan Sosial, Implementasi Kebijakan, Respon Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Kartu Huma Betang Sejahtera*

Abstract

This community service activity aims to describe the implementation of the distribution of the Huma Betang Sejahtera Card (KHBS) and the community response in Pasak Talawang District, Kapuas Regency. The KHBS program is a policy of the Central Kalimantan Provincial Government to improve community welfare through cash assistance, food assistance, and health and education services for beneficiaries. The activity was carried out through mentoring and socialization with data collection techniques in the form of observation and documentation. The activity stages include preparation, implementation, and monitoring. The results of the activity indicate that the distribution of KHBS went well through coordination between the local government, sub-district government, village government, volunteers, and the beneficiary community. The community gave a positive response because the program was considered to help meet basic needs and support the economic conditions of families, although there were still obstacles related to access to disbursement of assistance and the accuracy of targeting beneficiaries.

Kata Kunci: *Social Assistance, Policy Implementation, Community Response, Community Welfare, Huma Betang Sejahtera Card.*

PENDAHULUAN

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi risiko sosial akibat kondisi ekonomi tertentu. Kementerian Sosial Republik Indonesia (2020) menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dan ekonomi.

Program bantuan sosial menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan publik karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Agustino (2016), keberhasilan suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan proses administratif, tetapi juga koordinasi antar pelaksana, komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Salah satu program bantuan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan tunai, bantuan pangan, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat penerima manfaat.

Menurut Rahmat dan Iskandar (2022), implementasi bantuan sosial memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat pelaksana, dan masyarakat agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami tujuan dan mekanisme program agar pelaksanaan bantuan sosial dapat diterima dengan baik.

Kecamatan Pasak Talawang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki kondisi geografis cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas (2024), sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan tradisional. Kondisi tersebut menyebabkan program bantuan sosial memiliki peranan penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain faktor distribusi bantuan, respon masyarakat terhadap program bantuan sosial juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Winarno (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Meskipun program bantuan sosial telah dilaksanakan di berbagai daerah, pelaksanaan distribusi bantuan di wilayah dengan kondisi geografis yang relatif jauh dari pusat pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti aksesibilitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta pemahaman

masyarakat terhadap mekanisme program. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai implementasi penyaluran bantuan sosial serta respon masyarakat terhadap pelaksanaan program di tingkat kecamatan agar pelaksanaan program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera serta respon masyarakat terhadap pelaksanaan program di Kecamatan Pasak Talawang.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11-13 Maret 2026. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pendampingan penyaluran program bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera.

Sasaran kegiatan meliputi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ketua RT, relawan, dan masyarakat penerima manfaat program KHBS. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, dan monitoring selama proses distribusi bantuan berlangsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi kegiatan, dan pencatatan hasil diskusi selama kegiatan berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018).

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

1. Tahap Persiapan

Proses persiapan dilaksanakan dengan koordinasi antara tim Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Kecamatan Pasak Talawang mengenai jadwal pelaksanaan, cara distribusi, daftar penerima manfaat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Jumlah kartu yang dibagikan di tingkat kecamatan disesuaikan dengan daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pada fase ini juga dilakukan verifikasi administrasi dan persiapan distribusi sebelum kartu diserahkan kepada pemerintah kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan serah terima Kartu Huma Betang Sejahtera di Kantor Kecamatan Pasak Talawang yang melibatkan unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ketua RT, tim relawan, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima, penyampaian sosialisasi mengenai mekanisme program, penyampaian kanal pengaduan, serta distribusi kartu kepada pemerintah desa dan sebagian masyarakat penerima manfaat yang hadir.

3. Tahap Monitoring

Tahap monitoring dilakukan dengan mengamati jalannya proses penyaluran kartu dan respon masyarakat selama kegiatan berlangsung. Monitoring bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan,

tingkat pemahaman masyarakat terhadap program, serta manfaat yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program KHBS.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, dokumentasi aktivitas, dan pencatatan hasil diskusi serta tanggapan masyarakat selama proses distribusi. Informasi yang diperoleh meliputi pelaksanaan kegiatan, mekanisme distribusi kartu, tanggapan masyarakat terhadap program, kendala penyaluran bantuan, serta umpan balik dari pemerintah kecamatan dan masyarakat penerima manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam kegiatan pengabdian ini difokuskan pada implementasi penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) serta respon masyarakat terhadap pelaksanaan program di Kecamatan Pasak Talawang. Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan hasil diskusi selama kegiatan berlangsung. Pembahasan disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme pelaksanaan program, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta tanggapan masyarakat terhadap manfaat program bantuan sosial yang diberikan.

Kecamatan Pasak Talawang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki kondisi geografis relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kapuas Tengah dengan pusat pemerintahan berada di Desa Jangkang. Pusat pemerintahan Kecamatan Pasak Talawang berada di Desa Jangkang.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pasak Talawang bekerja pada sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan tradisional. Aktivitas ekonomi masyarakat masih didominasi oleh sektor primer dengan tingkat pendapatan yang relatif tidak tetap. Selain itu, kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat pelayanan publik menyebabkan akses masyarakat terhadap fasilitas tertentu, termasuk layanan perbankan, masih terbatas.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, kondisi sosial ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memerlukan dukungan pemerintah melalui program bantuan sosial. Oleh karena itu, program KHBS dinilai relevan dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal yang memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran proses penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan tugas dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pendistribusian KHBS di Kecamatan Pasak Talawang. Selanjutnya, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Pasak Talawang terkait jadwal pelaksanaan kegiatan, lokasi distribusi, mekanisme penyaluran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam

proses serah terima kartu. Selain itu, dilakukan pula pengecekan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian kartu dengan data penerima manfaat sebelum kartu diserahkan kepada pihak kecamatan.

Proses pendistribusian kartu menuju wilayah Kecamatan Pasak Talawang dilakukan melalui jalur darat dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan provinsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas (2024), sebagian besar masyarakat Kecamatan Pasak Talawang bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan tradisional sehingga keberadaan program bantuan sosial dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Purwanto dan Sulistyastuti (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, koordinasi antar pelaksana, serta efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, tahap persiapan menjadi bagian penting untuk memastikan proses distribusi bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026 di Kantor Kecamatan Pasak Talawang. Kegiatan melibatkan unsur pemerintah kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pemerintah desa, ketua RT, tim relawan, serta masyarakat penerima manfaat.

Tahap awal pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui proses serah terima Kartu Huma Betang Sejahtera dari tim pendistribusian kepada pemerintah kecamatan sebelum proses distribusi kepada masyarakat penerima manfaat dilaksanakan. Setelah proses penyerahan kartu dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh pihak-pihak terkait.



Gambar 1. Penyerahan kartu kepada pihak kecamatan

Selain proses distribusi kartu, kegiatan juga disertai dengan sosialisasi mengenai tujuan program, mekanisme penyaluran bantuan, serta penyampaian informasi terkait kanal pengaduan apabila masyarakat mengalami kendala dalam pelaksanaan program. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap program KHBS sehingga masyarakat dapat memahami prosedur pelaksanaan dan manfaat program secara lebih optimal.

Nugroho (2017) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh koordinasi antar pelaksana, komunikasi, dan mekanisme pelaksanaan program. Pernyataan tersebut sejalan dengan pelaksanaan distribusi KHBS yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat penerima manfaat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak kecamatan, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa perubahan kondisi ekonomi masyarakat sejak proses pendataan awal penerima manfaat dilakukan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, terdapat kemungkinan perubahan kondisi ekonomi sebagian masyarakat sejak proses pendataan awal dilakukan. Beberapa masyarakat yang sebelumnya tergolong layak menerima bantuan diketahui mengalami peningkatan kondisi ekonomi. Menanggapi hal tersebut, tim pelaksana menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan, relawan, pemerintah desa, dan ketua RT perlu melakukan verifikasi kembali agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Setelah proses serah terima selesai dilaksanakan, kartu kemudian diserahkan kepada relawan dan pemerintah desa untuk didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat di masing-masing wilayah. Sebagian kartu juga diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat yang hadir pada saat kegiatan berlangsung. Mekanisme distribusi tersebut menunjukkan adanya pola penyaluran bantuan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kecamatan, desa, hingga masyarakat penerima manfaat. Pratama (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar pelaksana dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program yang dijalankan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan penyaluran KHBS berjalan dengan baik. Keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat menjadi faktor pendukung dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan Pasak Talawang.

3. Tahap Monitoring

Tahap monitoring dilakukan selama proses kegiatan berlangsung melalui pengamatan terhadap pelaksanaan distribusi kartu dan tanggapan masyarakat terhadap program KHBS. Monitoring dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat, manfaat program yang dirasakan masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil monitoring, pelaksanaan program KHBS memperoleh tanggapan yang cukup baik dari masyarakat penerima manfaat. Masyarakat menyampaikan bahwa program bantuan sosial tersebut membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan memberikan dukungan terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Fitriani (2021) menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memberikan respon positif terhadap program bantuan sosial apabila bantuan tersebut dirasakan memberikan manfaat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Pasak Talawang yang menilai program KHBS membantu kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan keluarga.

Hasil monitoring juga menunjukkan bahwa masyarakat memandang program KHBS sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan bantuan sosial. Bantuan yang diberikan melalui program KHBS dinilai dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Meskipun demikian, hasil monitoring menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program. Salah satu kendala yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan mekanisme pencairan bantuan. Masyarakat menyampaikan bahwa jarak menuju Bank Kalteng sebagai bank penyalur bantuan relatif jauh dan membutuhkan biaya transportasi tambahan karena harus menggunakan jasa transportasi tertentu.

Hidayat dan Yusuf (2023) menyatakan bahwa keterbatasan akses layanan di wilayah pedesaan dapat mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial.

Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi yang selanjutnya akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) leading sector terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, pihak kecamatan juga mengusulkan kemungkinan penyaluran bantuan dilakukan melalui kantor kecamatan agar masyarakat lebih mudah mengakses bantuan.

Selain permasalahan akses pencairan bantuan, masyarakat juga memberikan perhatian terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat. Sebagian

masyarakat menilai masih terdapat penerima bantuan yang kondisinya sudah tergolong mampu. Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian terhadap aspek keadilan dan pemerataan dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Menurut Winarno (2016), implementasi kebijakan publik memerlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan dapat dipahami dan diterima secara optimal. Oleh karena itu, sosialisasi dan pembaruan data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas program bantuan sosial.

Analisis Respon Masyarakat terhadap Program KHBS

Respon masyarakat terhadap program KHBS menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami keberadaan program, tetapi juga merasakan manfaat program dalam kehidupan sehari-hari. Program bantuan sosial dinilai mampu membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan yang relatif tidak tetap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan hasil monitoring selama kegiatan berlangsung, sebagian besar masyarakat memberikan respon positif terhadap pelaksanaan program KHBS karena dinilai mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki kontribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Fitriani (2021) menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memberikan respon positif terhadap program bantuan sosial apabila bantuan tersebut dirasakan memberikan manfaat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Pasak Talawang yang menilai program KHBS mampu membantu kebutuhan ekonomi keluarga.

Selain memberikan manfaat ekonomi, program KHBS juga dinilai mampu meningkatkan rasa diperhatikan oleh pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap program menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial memberikan dampak positif terhadap masyarakat penerima manfaat.

Meskipun demikian, hasil monitoring menunjukkan masih terdapat beberapa tanggapan kritis dari masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan program, terutama mengenai ketepatan sasaran penerima manfaat dan akses pencairan bantuan. Sebagian masyarakat menilai masih terdapat penerima bantuan yang kondisinya sudah tergolong mampu sehingga diperlukan pembaruan data penerima manfaat secara berkala.

Ramadhani (2021) menyatakan bahwa validasi data penerima manfaat merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas program bantuan sosial

agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, Hidayat dan Yusuf (2023) menjelaskan bahwa keterbatasan akses layanan di wilayah pedesaan dapat mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan sosial kepada masyarakat.

SIMPULAN

Proses penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera di Kecamatan Pasak Talawang telah dilaksanakan dengan baik melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan monitoring. Proses distribusi dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat provinsi, kecamatan, desa, sampai masyarakat yang menerima manfaat. Kegiatan distribusi juga didukung oleh kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat.

Menurut hasil kegiatan, masyarakat memberikan berbagai tanggapan terhadap program KHBS. Kebanyakan orang berpendapat bahwa program itu memberikan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban keuangan keluarga. Di samping itu, masyarakat juga menyadari bahwa program KHBS adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Namun, masih ada beberapa masukan mengenai akurasi sasaran penerima manfaat, akses pencairan bantuan, serta pemahaman masyarakat tentang mekanisme program. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan penyuluhan mengenai program KHBS kepada masyarakat dan melakukan pembaruan data penerima manfaat secara rutin agar program bantuan sosial dapat berfungsi lebih efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas. (2024). *Kabupaten Kapuas dalam angka 2024*. Kapuas: BPS Kabupaten Kapuas.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Los Angeles: Sage Publications.
- Fitriani. (2021). Respon masyarakat terhadap program bantuan sosial di daerah pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik*, 5(2), 100–110.
- Hidayat, R., & Yusuf, M. (2023). Aksesibilitas layanan publik dan efektivitas bantuan sosial di wilayah pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 45–56.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman umum bantuan sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Teori kebijakan, analisis, implementasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratama, A. (2022). Koordinasi implementasi program bantuan sosial di tingkat daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(3), 210–220.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmat, A., & Iskandar, D. (2022). Efektivitas implementasi program bantuan sosial daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 33–42.

Ramadhani, S. (2021). Validasi data penerima bantuan sosial dalam meningkatkan ketepatan sasaran program. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 9(2), 88–97.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).